



## EVALUASI KESESUAIAN LAHAN LOKASI TRANSMIGRASI SP4 HOTE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Roberth Berthy Riry<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> Evaluasi, Kesesuaian Lahan, Transmigrasi, SP4 Hote</p>	<p>Program transmigrasi adalah kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Pemilihan lokasi transmigrasi yang tepat penting untuk kesuksesan program ini. Kesesuaian lahan menjadi faktor kunci dalam menentukan lokasi optimal. Penelitian ini mengkaji kesesuaian lahan untuk lokasi transmigrasi dengan mempertimbangkan kondisi fisik lahan, sosial ekonomi masyarakat setempat, dan kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian lahan di SP4 Hote sangat tergantung pada kondisi fisik lahan, seperti kesuburan tanah, ketersediaan air, topografi, dan iklim. Faktor sosial ekonomi seperti aksesibilitas, kesempatan kerja, dan keberlanjutan ekonomi juga penting. Luas lahan di SP4 Hote adalah 725 Ha, termasuk untuk lahan pekarangan, lahan usaha, fasilitas umum, kuburan, test farm/seed farm, jalan, dan konservasi. Komposisi transmigran lokal dan luar propinsi di Hote adalah 40% dan 60%. Komoditas yang dapat dikembangkan di lokasi ini termasuk tanaman pangan, buah-buahan, dan tanaman tahunan seperti karet dan kelapa sawit.</p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Evaluation, Land Suitability, Transmigration, SP4 Hote</i></p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>The transmigration program is a government policy aimed at accelerating development in remote areas. Selecting the right transmigration locations is crucial for the success of this program. Land suitability is a key factor in determining the optimal location. This study assesses land suitability for transmigration locations by considering the physical conditions of the land, the socio-economic conditions of the local community, and the applicable policies. The research findings indicate that land suitability in SP4 Hote is highly dependent on physical land conditions, such as soil fertility, water availability, topography, and climate. Socio-economic factors such as accessibility, employment opportunities, and economic sustainability are also important. The land area in SP4 Hote is 725 hectares, including residential plots, farming areas, public facilities, cemeteries, test farms/seed farms, roads, and conservation areas. The composition of local and non-local transmigrants in Hote is 40% and 60%, respectively. The commodities that can be developed in this location include food crops, fruits, and perennial crops such as rubber and oil palm.</i></p>

**\*Corresponding Author:**

**Roberth Berthy Riry**

Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan IPS FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

riry.berthy@gmail.com

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan program transmigrasi merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga

pelaksanaannya tidak terlepas dari arah tujuan, dan ruang lingkup dari pembangunan nasional. Proses penyelenggaraan transmigrasi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara

merupakan bagian dari pembangunan daerah. Program transmigrasi atau perpindahan penduduk telah dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, dengan istilah kolonisasi. Pelaksanaan program kolonisasi dimulai pada tahun 1905 (Heeren, 1979). Penyediaan dan penyiapan calon Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) harus mempunyai keterkaitan langsung atau didukung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di samping itu, kondisi lokasi harus jelas letak, luas dan batas fisik (clear) dan sudah bebas dari tuntutan hak-hak masyarakat atau hak-hak lainnya (clean). Pengukuhan lokasi yang sudah clear and clean oleh Bupati/Walikota/Gubernur menjadi dasar untuk menyusun rencana dan pengembangan Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk disesuaikan dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok yang dikembangkan.

Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah permukiman yang berskala dengan daya tampungnya berkisar antara 100 KK s/d 2.000 KK, sehingga rancangan suatu lokasi permukiman transmigrasi ada yang berdiri sendiri dengan membangun kelengkapan prasarana dan sarana, namun ada pula yang menyisip atau menyatu dengan permukiman yang sudah ada dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang sudah tersedia. Menurut Yudohusodo (1998), tiga kendala utama penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu (1) kendala struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, baik dengan program-program sektor lain maupun dengan instansi lain yang terkait; (2) kendala substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional; dan (3) kendala teknis operasional yang disebabkan oleh kompleksnya masalah pembangunan transmigrasi. Kompleksitas masalah teknis operasional mengakibatkan munculnya masalah baru dalam program transmigrasi, antara lain pemilihan lokasi yang kurang tepat, studi kelayakan yang tidak tepat, penataan ruang dan pola usaha yang kurang sesuai, serta kurang terpadunya

program lintas sektor dan lintas kegiatan pembangunan.

Permukiman transmigrasi berfungsi untuk mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang. Pada pusat pertumbuhan tersebut dapat dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman dan saling berhubungan dalam tatanan jaringan jalan, sehingga akan membentuk beberapa Satuan Kawasan Pengembangan yang menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi. Dengan dikembangkannya lokasi permukiman transmigrasi diharapkan akan tercipta kesempatan kerja, peluang berusaha, baik usaha primer, sekunder maupun tersier, sesuai dengan pola usaha pokok yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar, sehingga akhirnya dapat membantu meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka peran Pemerintah Pusat adalah sebagai fasilitator yang meliputi antara lain advokasi, fasilitasi dan bimbingan serta mendukung pendanaan/penganggarannya bagi Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan penyelenggaraan transmigrasi berjalan sesuai dengan aspirasi daerah dan terwujud pedoman bagi pemerintah di daerah, dalam pelaksanaan pembangunan lokasi permukiman transmigrasi. Perubahan dalam regulasi ketransmigrasian dibuat untuk memperbaiki regulasi sebelumnya dan disesuaikan dengan perkembangan situasi setempat. Namun demikian, program transmigrasi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan. Menurut Dwiyanto (2003) bahwa penyelenggaraan transmigrasi pada era otonomi daerah menimbulkan berbagai macam konflik, seperti konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah, konflik antarmasyarakat, dan konflik antardaerah. Latar belakang munculnya konflik antara lain (1) persoalan sosial, seperti perselisihan

warga; (2) persoalan politik, seperti konflik antara kepala daerah dan DPRD, konflik antar-instansi, konflik antara pendukung partai politik; dan (3) persoalan ekonomi, seperti sengketa tanah, perselisihan pengelolaan sumber daya alam, konflik perburuhan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengaturan mengenai lokasi Permukiman Transmigrasi sebagai penjabaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang fungsinya lebih aplikatif dan operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ketransmigrasian. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dijadikan dasar, pedoman atau acuan kerja bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dalam penyediaan lokasi permukiman transmigrasi.

Salah satu wilayah yang dapat dipertimbangkan sebagai calon lokasi permukiman transmigrasi yakni wilayah Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT Provinsi Maluku. Penyusunan RTSP dengan pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) di lokasi studi desa Dawang dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Rencana dan Pembangunan Kawasan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Departemen Nakertrans RI. Harapan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana di daerah transmigrasi adalah pembangunan nasional dapat tercapai melalui peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Witoelar (2000) bahwa pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan pada suatu wilayah atau daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan (Lasaiba & Saud, 2022).

Prosedur dan kriteria penyusunan rencana teknis satuan permukiman untuk penyiapan lokasi permukiman transmigrasi ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan kerja bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/kota dan Instansi terkait dalam melaksanakan tugas penyiapan lokasi permukiman Transmigrasi. Sedangkan tujuannya adalah agar dapat diperoleh kesamaan persepsi dan langkah-langkah dalam penyediaan lokasi permukiman transmigrasi yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah setempat.

Sasaran yang dicapai dalam Keputusan Menteri tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) adalah terwujudnya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian lahan bagi lokasi transmigrasi SP4 Hote dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi fisik lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Secara umum metode yang digunakan adalah metode survey dengan beberapa tahapan, yaitu (1) pembuatan peta dasar, (2) perencanaan, (3) pekerjaan persiapan, (4) pekerjaan lapangan dan (5) pengolahan data dan penyusunan laporan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teodolith (T0), Kompas, Kompas Geologi, Palu Geologi, Buku Munsell Soil Color Chart, Bor Tanah/Auger, pH Meter, GPS (Global Positioning System), Altimeter atau Klinometer, Abneylevel, Pisau dan Skop Lapang, Meter rol (*Besar dan Kecil*), Loup/Kaca Pembesar, Buku Lapang dan Peralatan Tulis dan Seperangkat Komputer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Peta Geologi, Peta Topografi, Citra satelit, Aquades, Larutan HCl, Larutan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Pekerjaan kemudian disesuaikan dengan ketentuan pada syarat Transmigrasi.

Tahapan persiapan dalam kegiatan ini, meliputi 1) persiapan administrasi, 2) studi kepustakaan tentang lokasi studi (keadaan geologi, topografi, inventarisasi sebagian data iklim, social budaya dan ekonomi, serta struktur penduduk), 3) interpretasi potret udara wilayah studi dan pembuatan peta kerja lapangan, dan 4) pengadaan alat dan bahan survei sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemetaan topografi untuk pekerjaan penyusunan RTSP menyangkut : pengukuran pengikatan, pengukuran kerangka dasar (*base line*) pengukuran lereng dalam rintisan 500 m, pengukuran topografi dalam jalur rintisan 250 m pada areal calon lahan untuk FU, LP, dan LU-I, pengukuran topografi dalam jalur rintisan 125 m pada areal FU dan LP, serta pengukuran batas pembukaan lahan. Pengukuran topografi untuk pekerjaan RTJ, mencakup : perintisan dan pemasangan patok pengukuran trase jalan, pengukuran polygon jalan, pengukuran besa tinggi jalan (*water pass*), pengukuran situasi dan alinemen horizontal serta pematokkan sumbu rencana jalan (*stake out center line*).

Penelitian iklim dan potensi sumber daya air dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan iklim, ketersediaan sumber daya air dan resiko banjir, inventarisasi dan analisis data iklim berupa curah hujan dan distribusinya, evapotranspirasi dan neraca air, serta unsur-unsur iklim lain, seperti : penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Perkiraan evapotranspirasi potensial menggunakan metode *Modified Penman* (Doorenbos dan Kassam, 1979) menggunakan data iklim dari Stasiun Meteorologi Geser dan Stasiun Iklim lainnya yang representatif. Dengan menggunakan nilai rata-rata curah hujan bulanan dapat ditentukan tipe iklim di lokasi studi dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Oldeman *et al* (1975).

Kajian hidrologi dilakukan pada aliran sungai dan sepanjang rintisan. Pengamatan dilakukan terhadap sungai-sungai serta alur yang ada, daerah genangan/banjir, daerah drainase, sumur uji di LP dan PD. Kualitas air minum dinilai berdasarkan standar baku mutu menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kep.MenKes RI) No. 907/SK/VII/2002; Tanggal 29 Juli 2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Sementara air untuk pengembangan pertanian berdasarkan kriteria FAO dan US Salinity Staf.

Kajian tanah dilaksanakan dengan pemboran dan deskripsi profil perwakilan mengikuti rintisan survai topografi (500 m dan 250 m) dengan interval pengeboran 250

m atau kerapatan setiap 1/12 ha di seluruh areal survai dan kerapatan 1/6,25 ha pada areal calon FU, LP, dan LU-I.

Sampel tanah komposit/kesuburan diambil pada calon LP dan LU-I dengan kedalaman 0 – 3 cm dengan kerapatan 1/25 Ha. sementara untuk calon LU-II dengan kerapatan 1/50 Ha pada kedalaman 0 – 3 cm dan 30 – 60 cm. Sampel tanah dari profil perwakilan dianalisis untuk memperoleh tekstur, pH, Total N-P dan K tersedia, C-organik, KTK, dan kejenuhan basa (KB) serta basa-basa dapat ditukar. Sampel tanah kesuburan dianalisis seperti profil perwakilan, ditambah dengan analisis P-tersedia, A1 dapat ditukar dan H dapat ditukar.

Peta Satuan Lahan (SPL) dengan skala 1 : 10.000 untuk seluruh areal penelitian dan skala 1 : 5.000 untuk lahan Fasilitas Umum (FU) dan Lahan Pekarangan (LP), serta dilengkapi dengan legenda yang menunjukkan bentuk wilayah, lereng, bahan induk, tekstur tanah, KTK, pH, N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dan K<sub>2</sub>O. Penilaian kesesuaian lahan aktual dan potensial pada masing-masing SPL diarahkan untuk tanaman pangan lahan kering (TPLK), dan tanaman perkebunan sesuai kriteria dan petunjuk yang tertuang dalam buku pedoman penyusunan RTSP dan RTJ. Setelah itu, dilakukan penilaian kesesuaian lahan terhadap beberapa jenis komoditas hingga dapat ditentukan jenis komoditas yang paling sesuai untuk dikembangkan.

Perhitungan kebutuhan kapur, dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan untuk jenis-jenis tanah yang dipandang perlu. Proses pemberian dilakukan pada kedalaman 0 – 30 cm; dengan menggunakan rumus Cochrane, Salinas, dan Sanchez (1980), dengan formulasi sebagai berikut: CO<sub>3</sub> (ton/Ha) = 1,8 × [A1 – RAS × (A<sub>1</sub> + Ca + Mg)], dimana RAS merupakan kejenuhan A1 yang ditolelir (Required A1 Saturation). Perhitungan kebutuhan pupuk didasarkan dari hasil analisis tanah dan kebutuhan hara tanaman, terutama N, P dan K, di samping hasil penelitian lainnya. Sementara penilaian tingkat erosi pada setiap kisaran lereng, dilakukan dengan menggunakan rumus USLE. Pembuatan peta kesesuaian lahan dengan skala 1 : 10.000 untuk seluruh areal survey, sedangkan skala 1 : 50.000 untuk LP dan LU-

I, serta dilengkapi dengan rekomendasi masukan perbaikan.

Penelitian mengenai potensi tegakan kayu menggunakan cara sampling pada plot berukuran 50 x 20 m (0,1 ha) secara acak pada rintisan survei topografi. Penelitian ini hanya meliputi 1% dari total areal LP, LU-I dan LU-II (areal permukiman).

Kajian aspek sosial-budaya difokuskan pada struktur penduduk dan ketenagakerjaan, serta kemungkinan pemanfaatannya untuk pengembangan usaha di wilayah permukiman transmigrasi, keadaan fasilitas pelayanan sosial, adat-istiadat/kebiasaan dan hukum adat atas kepemilikan tanah, serta tanggapan masyarakat lokal/setempat terhadap program transmigrasi.

Sementara kajian aspek ekonomi difokuskan pada keadaan kepemilikan lahan usaha, pola tanam dan jawal tanam, tingkat produktivitas usahatani, hama tanaman terpadu, ketersediaan input produksi, distribusi/pemasaran hasil pertanian, kelembagaan ekonomi, ketahanan pangan, pendapat dan pengeluaran penduduk. Rencana teknis jalan dalam pekerjaan RTSP terdiri atas jalan poros untuk menghubungkan SP dan antara kapling perumahan, dan jalan desa untuk menghubungkan blok lahan pekarangan (LP) dengan pusat SP. Perencanaan teknis jalan poros didasarkan dari hasil pengukuran topografi dan analisis mekanika tanah dan sumber material. Analisis mekanika tanah dilakukan pada alinemen horizontal rencana jalan. Pengamatan tanah dasar (visual) dengan kedalaman 1 m dilakukan dengan bor tangan (auger) setiap jarak 1 km.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif lokasi SP 4 Hote berada pada wilayah desa Hote Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang berjarak 2 km dari Desa Hote dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan waktu ± 1 jam perjalanan serta dari Ibukota Kabupaten (Bula) dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) dengan waktu ± 1,5 jam berjarak 20 km.

Letak astronomi lokasi SP4 Hote pada koordinat 03°00'00"LS – 03°02'00" LS dan 130°20'56"BT - 130°22'51" BT dengan luas

725 Ha. Letak geografis lokasi SP4 secara fisik memiliki batas – batas yaitu 1) sebelah Timur dengan Sungai Tibi, 2) sebelah Barat dengan Gunung Kapailo, 3) sebelah Utara dengan Jalan Kabupaten dan 4) sebelah Selatan dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversikan (HPK).

Pencapaian lokasi dari kota Ambon (ibukota Provinsi) saat ini dapat ditempuh dengan sarana transportasi darat, laut dan udara. Jalur darat menggunakan mobil dari Ambon menuju Tulehu, kemudian dari Tulehu menuju Amahai (Masohi) menggunakan kapal cepat dan dari amahai menuju SP4 (Hote) menggunakan mobil. Jalur Udara menggunakan pesawat terbang dari bandara Pattimura Ambon menuju Bula dan dilanjutkan dengan mobil dari Bula menuju SP4 (Hote). Jalur laut menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Slamet Riyadi Ambon menuju pelabuhan Bula dan dari Bula menuju SP4 (Hote) menggunakan mobil.

Lokasi penelitian memiliki 4 (empat) kelas kemiringan lereng yaitu (1) datar (lereng 0-3%), (2) beombak (lereng 4-8%), (3) bergelombang (lereng 9-15%), dan (4) berbukit (lereng 16-25%).

Data iklim lokasi penelitian diperoleh dari stasiun Meteorologi dan Geofisika Bula dengan periode pencatatan selama 10 tahun (2010 – 2019). Dari hasil tabulasi data iklim maka diperoleh Jumlah curah hujan tahunan ada 2.940,19 mm dengan rata-rata 234,02 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret (355,10 mm) dan terendah pada bulan Juni (78,65 mm). Jumlah hari hujan tahunan adalah 192 mm dengan rata-rata 16 mm per bulan. Rata-rata suhu udara lokasi 26,78°C dengan suhu terendah 21,78° C yang jatuh pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi jatuh pada bulan Mei (31,9°C). Rata-rata kelembaban udara tahunan adalah 82,6 persen pertahun dengan kelembaban tertinggi jatuh pada bulan Januari (85,4 %), dan terendah jatuh pada bulan Agustus (76,6 %). Rata-rata penyinaran matahari pertahun adalah 55,7 peren, dengan lamanya penyinaran terendah jatuh pada bulan Januari sebesar 44,4 % dan tertinggi jatuh pada bulan Juli sebesar 66,4 persen. Rata-rata kecepatan angin tahunan adalah 7,2 km/jam, dengan kecepatan angin terendah jatuh pada bulan

Mei dan Juni sebesar 6,7 km/jam, serta tertinggi pada bulan September sebesar 7,9 km/jam. Besarnya penguapan dalam satu tahun adalah 1.409,74 mm dengan rata-rata bulanan adalah 117,47 mm. Penguapan terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 147,90 mm, dan terendah jatuh pada bulan Desember yaitu 85,72 mm. Berdasarkan data iklim maka lokasi penelitian termasuk dalam tipe iklim B1 (Oldeman, 1980) karena memiliki bulan basah (curah hujan > 200 mm) selama 7 bulan yaitu bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Oktober, Nopember, dan Desember, sedangkan bulan basah selama 2 bulan basah (curah hujan < 100 mm) selama 2 bulan (Juli, dan Agustus). Kondisi hidrologi yang dinilai adalah kondisi sungai yang berada di sekitar lokasi penelitian dilalui oleh DAS Sungai Tibi dan beberapa sungai kecil. Ketersediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk berasal dari 2 sumber yaitu (1) air sumur dan (2) air hujan. Air sumur dangkal memiliki kualitas yang cukup baik sebagai air minum yang ditunjukkan fisik air yang berwarna bening, tidak berbau, dan tidak berasa, serta secara kuantitasnya cukup banyak. Sedangkan secara kimia maka pH air sumur agak masam, sehingga perlu dilakukan perlakuan tertentu sebelum dipergunakan sebagai air minum (dengan menambahkan tawas atau kapur). Berdasarkan pada hasil perhitungan daya tampung air hujan yang melewati atap rumah rata-rata adalah 9.605 lt/bln.

Status hutan lokasi penelitian SP4 menurut peta Status Hutan dan Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 725 Ha yang terdiri dari penggunaan lahan Hutan Sekunder seluas 302 ha (41,85%) dan Semak Belukar seluas 423 ha (58,35%). Berdasarkan pada hasil perhitungan potensi tegakan lokasi per hektar dengan diameter antara 7 – 120 cm. adalah 1.136,83 pohon dengan potensi kayu log sebesar 23,28 m<sup>3</sup>/Ha, dan mempunyai jumlah pohon ekuivalen per Ha (JPE/Ha) sebesar 1.564,55 pohon. Sumberdaya hutan berupa (1) flora, dan (2) fauna. Jenis tumbuhan hutan adalah jenis-jenis vegetasi sagu, meranti, lenggua, aren, kayu burung, kayu marong, kayu manggis hutan, pala hutan, nibung,

rotan, ketapang hutan, jambu hutan, kayu titi dan vegetasi bawah lainnya. Jenis fauna yang dijumpai pada lokasi terdiri dari : (1) kelompok burung yaitu : tekukur, nuri, kakatua, pombo, ayam hutan dan burung hantu (2) kelompok reptile yaitu : ular, biawak, kura-kura, ular air, dan kadal, (3) kelompok mamalia yaitu : rusa, babi hutan, musang dan tupai, serta (4) kelompok ikan yaitu : ikan gabus, mujair, udang kecil dan besar.

Satuan lahan pada lokasi penelitian disusun berdasarkan jenis tanah, bahan induk, fisografi, bentuk wilayah (kelerengan). Dari hasil kompilasi unsur satuan lahan ini maka diperoleh 5 satuan lahan yakni SPL 1, SPL 2, SPL 3, SPL 4, dan SPL 5. Karakteristik masing – masing SPL yaitu :

- 1) SPL 1 : Alluvial Distrik (Juknis Klasifikasi Tanah Nasional 2014 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), tekstur lapisan atas lempung berdebu, lapisan bawah lempung berpasir, solum tanah dalam (>120 cm), drainase baik, reaksi tanah masam (5,5) KTK rendah (14,02) KB tinggi (66,83), Typic tropofluvents (Keys to Soil Taxonomy - USDA, 2022), bahan Induk Aluvium pada fisiografi dataran banjir (lereng 0-3%) dengan Luas 295 Ha (40,68%) ;
- 2) SPL 2 : Alluvial gleik (Juknis Klasifikasi Tanah Nasional 2014), tekstur lapisan atas lempung berdebu, lapisan bawah lempung berpasir, solum dalam (>120 cm), drainase buruk, reaksi tanah masam (5,5) KTK rendah (15,15), KB rendah (10,20), Typic tropofluent (Keys to Soil Taxonomy - USDA, 2022), bahan induk Alluvium pada fisiografi dataran banjir (lereng 0 – 2 %) dengan luas 228 Ha (31,17 %) ;
- 3) SPL 3 : Kambisol distrik (Juknis Klasifikasi Tanah Nasional 2014), tekstur lapisan atas lempung liat berdebu, lapisan bawah lempung berpasir, solum dalam (>120 cm) drainase baik, reaksi tanah masam (5,5) KTK rendah (13,85) KB rendah (19,56), Typic distopepts (Keys to Soil Taxonomy - USDA, 2022), bahan induk batuan liat pada fisiografi dataran (lereng agak agak datar 4 – 8 %) dengan luas 136 Ha (18,75%) ;

- 4) SPL 4 : Kambisol distrik (Juknis Klasifikasi Tanah Nasional 2014), tekstur lapisan atas lempung liat berdebu, lapisan bawah lempung berpasir, solum dalam (>120 cm) drainase baik, rekasi tanah masam (5,5), KTK rendah (11,18), KB rendah (18,47), Typic distropepts (Keys to Soil Taxonomy - USDA, 2022), bahan induk batuan liat pada fisiografi dataran (lereng 9 – 15%) dengan luas 26 Ha (3,60%) dan
- 5) SPL 5 : Kambisol distrik (Juknis Klasifikasi Tanah Nasional 2014), tekstur lapisan atas lempung liat berdebu, lapisan bawah lempung berpasir, solum dalam (>120 cm) drainase baik, rekasi tanah masam (5,5), KTK rendah (11,18), KB rendah (18,47),

Typic distropepts (Keys to Soil Taxonomy - USDA, 2022), bahan induk batuan liat pada fisiografi dataran (lereng agak curam 16 – 25%).

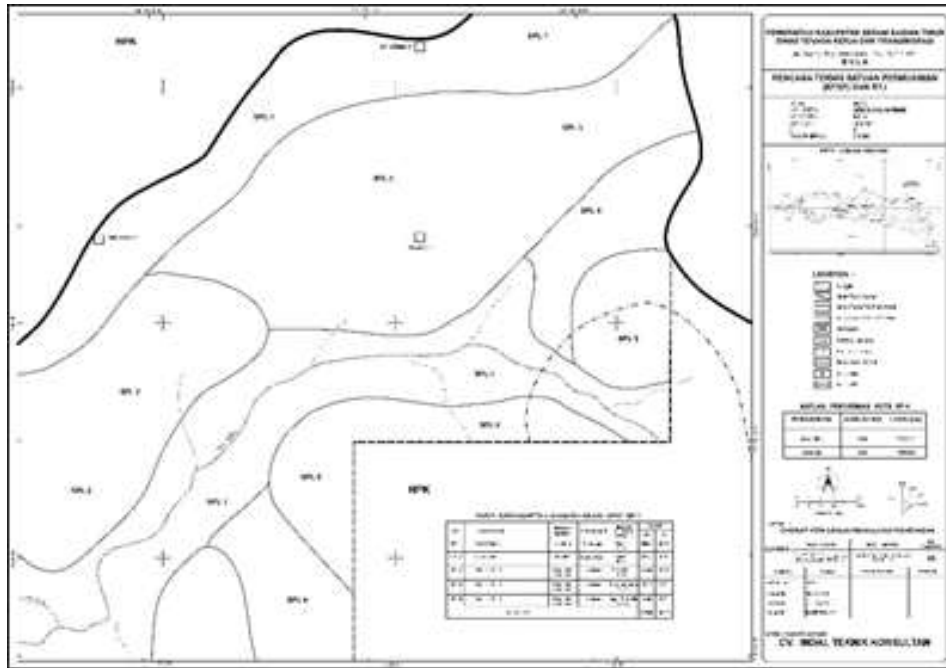
#### Kesesuaian Lahan

Penetapan kelas kesesuaian lahan didasarkan pada sistem klasifikasi kesesuaian lahan yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengamatan Tanah dan Agroklimat (PUSLITANAK, 2003; Lasaiba, 2023). Sebaran kesesuaian lahan lokasi penelitian untuk jenis tanaman pertanian disajikan pada Tabel 2 dan Peta Kesesuaian Lahan terlihat pada Gambar 2.

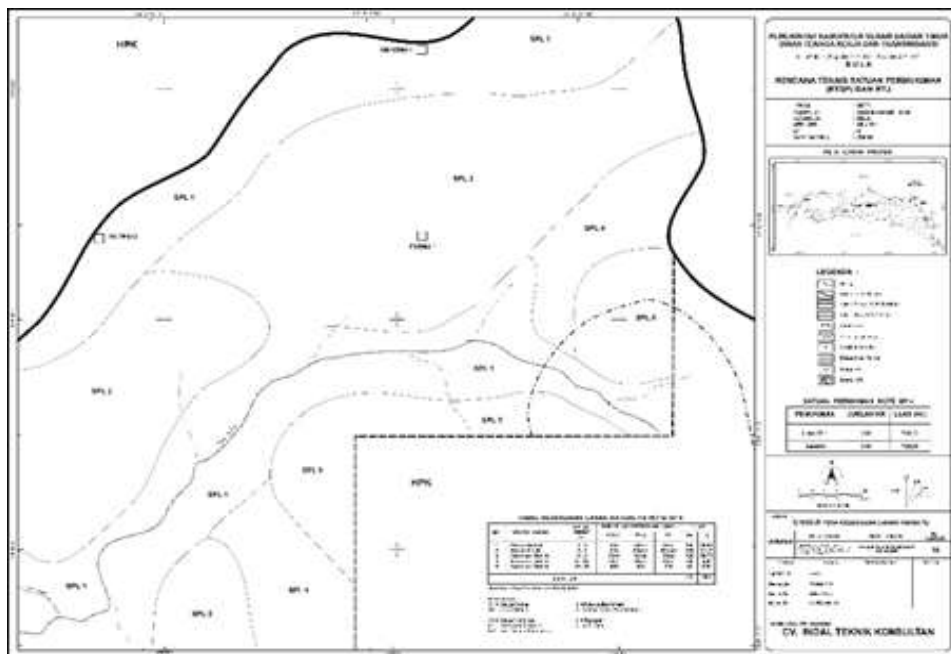
Tabel 2. Sub Kelas Kesesuaian Lahan Aktual dan Potensial Tanaman Pangan dan Sayuran.

No SPT	Sub Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Pangan Dan Sayuran									Luas				
	Padi Gogo, Ubi Kayu, Kacang, Kedelai			Jagung, Kacang Panjang, Bayam			Terung, Pare, Sawi, Mentimun, Cabai, Tomat			Ha	%			
	Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P					
1	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	295	40,68			
2	S3-fh	L/Li	S2	S3-fh	L/Li	S2	S3-fh	L/Li	S2	226	31,17			
3	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	136	18,75			
4	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	26	3,60			
5	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	42	5,80			
<b>Total</b>										<b>725</b>	<b>100,00</b>			
No SPT	Sub Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Buahhan											Luas		
	Semangka, Papaya, Jeruk, Durian, Petai			Nangka			Mangga			Pisang			Ha	%
	Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P		
1	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	295	40,68
2	S3-fh	L/Li	S2	S3-fh	L/Ti	S2	S3-fh	L/Li	S2	S3-fh	L/Li	S2	226	31,17
3	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/TM	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	136	18,75
4	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	26	3,60
5	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	42	5,80
<b>Total</b>										<b>725</b>	<b>100,00</b>			
No SPT	Sub Kelas Kesesuaian Lahan Beberapa Jenis Buah-Buahan Dan Tanaman Tahunan									Luas				
	Buah-Buahan			Tanaman Tahunan			Ha	%						
	Nenas, Kopi, Kelapa			Manggis					Karet, Kelapa Sawit					
Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P	Aktual	I/Ti	P						
1	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	295	40,68			
2	S3-fh	L/Li	S2	S3-fh	L/Li	S2	S3-fh	L/Li	S2	226	31,17			
3	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/TM	S2	S3-nr	L/Li	S2	136	18,75			
4	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	S3-nr	L/Li	S2	26	3,60			
5	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	S3-eh	L/Li	S2	42	5,80			
<b>Total</b>										<b>725</b>	<b>100,00</b>			

Sumber : Hasil analisis data lapangan, Tahun 2022



Gambar 1. Peta Satuan Lahan SP4 Hote.



Gambar 2. Peta Kesesuaian Lahan SP4 Hote.

### Rencana Tataruang Satuan Permukiman Dan Rencana Teknis Jalan.

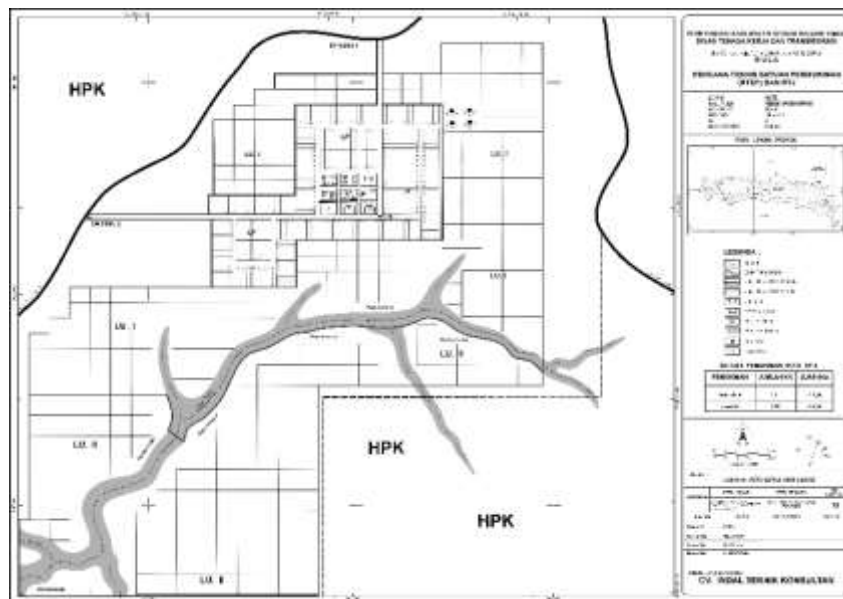
Luas lahan yang diperuntukan bagi areal transmigrasi adalah 725 Ha, yang mana diperuntukan bagi lahan pekarangan (52,50 Ha), Lahan usaha I (157,50 Ha), fasilitas umum pusat desa (6,00 Ha), kuburan (2,50 Ha), test farm/seed farm (3,00 Ha), jalan

poros/penghubung (4,44 Ha), jalan desa (4,65 Ha), konservasi (284,41 Ha) dan lahan usaha II (210,00 Ha) sedangkan Koordinat Patok Batas Pembukaan Lahan terlihat pada tabel 3 dan Peta Detail Tata Ruang SP4 Hote dapat dilihat pada Gambar 3.



Tabel 3. Koordinat Patok Batas Pembukaan Lahan.

No	Nomor Patok	Koordinat		
		X (m)	Y (m)	Z (mdpl)
1.	BM.0	649.420	9.666.150	10,508
2.	BM.1/BMJ.0	652.099	9.668.171	7,394
3.	PD/BMJ.2	652.100	9.667.171	12,472
4.	BM.2/BMJ.2	650.700	9.666.330	11,493
5.	BM.3	650.000	9.666.210	11,714
6.	BM.4	652.615	9.668.526	6,124
7.	BPL.1	651.035	9.666.498	18,256
8.	BPL.2	650.400	9.666.502	14,321
9.	BPL.3	650.400	9.666.738	12,741
10.	BPL.4	650.720	9.667.022	14,829
11.	BPL.5	651.291	9.667.032	15,756
12.	BPL.6	651.291	9.667.602	10,492
13.	BPL.7	651.602	9.668.035	7,824
14.	BPL.8	652.455	9.668.035	7,021
15.	BPL.9	652.455	9.668.192	6,559
16.	BPL.10	653.050	9.668.192	6,623
17.	BPL.11	653.050	9.666.665	35,248
18.	BPL.12	652.335	9.666.928	22,174
19.	BPL.13	651.725	9.666.882	22,501



Gambar 3. Peta Detail Tata Ruang SP4 Hote.

### Sosial Ekonomi

Kondisi kesesuaian aktual lahan lokasi transmigrasi yang rata-rata pada tingkat kelas kesesuaian lahan S3 dengan faktor pembatas dominan adalah kesuburan dan pH tanah maka tindakan perbaikan atau masukan untuk menaikkan ke kelas yang lebih tinggi (S2) adalah dengan pengapuran yaitu :

- a) Metoda AI-dd (ton/Ha) pada SPL 1 (0,42), SPL 2 (0,52), SPL 3 (0,88), SPL 4 (0,82) dan SPL 5 (0,96).

- b) Dasar pH pada SPL 1 – SPL 5 adalah 3,1.

- c) Metoda AI-dd (ton/Ha) pada SPL 1 (1,76), SPL 2 (1,81), SPL 3 (1,99), SPL 4 (1,96) dan SPL 5 (2,03).

Sedangkan pemberian dosis pupuk (kg/Ha) pada setiap TSP yaitu :

- a) Komoditi Jagung kebutuhan pupuk Urea (158 kg/Ha), TSP (52 kg/Ha) dan KCl (45 kg/Ha).

- b) Komoditi Kedelai kebutuhan pupuk Urea (16 kg/Ha), TSP (40 kg/Ha) dan KCl (37 kg/Ha).
- c) Komoditi Kacang Tanah kebutuhan pupuk Urea (17 kg/Ha), TSP (57 kg/Ha) dan KCl (38 kg/Ha).
- d) Komoditi Kacang Hijau kebutuhan pupuk Urea (10 kg/Ha), TSP (37 kg/Ha) dan KCl (40 kg/Ha).
- e) Komoditi Ubi kayu kebutuhan pupuk Urea (126 kg/Ha), TSP (35 kg/Ha) dan KCl (71 kg/Ha).
- f) Komoditi Padi Gogo kebutuhan pupuk Urea (88 kg/Ha), TSP (68 kg/Ha) dan KCl (55 kg/Ha).

Berdasarkan kondisi lahan lokasi penelitian maka jenis komoditas yang dapat dikembangkan adalah : (1) tanaman pangan dan sayuran (padi gogo, ubi kayu, kacang tanah, jagung, kacang panjang, bayam, terung, pare, sawi, mentimun, cabai dan tomat); (2) tanaman buah-buahan (semangka, papaya, jeruk, durian, petai, cempedak, nangka, mangga, pisang, nenas, kpoi, kelapa, manggis); dan (3) tanaman tahunan (karet, kelapa sawit).

Pola tanam di lokasi penelitian dibagi dalam 3 (tiga) musim yaitu (1) Musim tanam I (awal bulan Oktober atau akhir September hingga Januari, (2) Musim tanam II (akhir Januari sampai awal Februari dan berakhir bulan April dan (3) Musim tanam III (dapat ditanam dengan palawija dengan waktu tanam pada akhir April hingga akhir Juli untuk jenis tanaman Padi gogo, Kacang tanah, Jagung, Ubi kayu, Kacang hijau, Kedelai, Sayuran dan semangka.

### Sosial Budaya

Aspirasi masyarakat Negeri menyambut program transmigrasi ini sangat besar. Hal ini harus dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Untuk Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri (Raja Negeri), serta turut ditanda tangani oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan diketahui Kepala Kecamatan dan Bupati Kabupaten.

Komposisi TPS dan TPA untuk lokasi SP4 Hote adalah 40 persen (82 KK) transmigran lokal dan 60 persen (126 KK) berasal dari luar Provinsi Maluku.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam komposisi dan distribusi Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) untuk menempati lokasi permukiman transmigrasi, yaitu (1) Untuk menghindari permukiman yang eksklusif pemerintah terlebih dahulu menyediakan sarana transportasi, (2) Kebijakan transmigrasi jangan berorientasi target kuantitatif, tetapi harus memperhatikan kompetensi calon transmigran, kesesuaian kultur, dan kelayakan lahan, (3) Sebelum melakukan transmigrasi sebaiknya pemerintah, baik pusat maupun daerah harus memperhatikan kualitas SDM yang akan ditansmigrasikan tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi calon wilayah permukiman transmigrasi tersebut atau tidak, (4) Para transmigran harus didorong untuk mewujudkan emansipasi transmigran dalam menjalankan berbagai aktifitasnya dan (5) Pemerintah sebelum memberangkatkan para transmigran terlebih dahulu harus menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung.

Tidak spesifik keinginan masyarakat desa Hote untuk menerima transmigrasi yang berasal dari suatu daerah tertentu akan tetapi ada beberapa hal yang diharapkan oleh mereka antara lain :

- a. Transmigran pendatang diharapkan tidak berasal dari salah satu suku yang pernah terlibat dalam kerusuhan etnis.
- b. Secara spesifik mereka tidak meminta transmigran berasal dari tempat tertentu akan tetapi transmigran yang datang diharapkan mereka yang rajin dan punya ketrampilan bercocok tanam secara baik dan betah tinggal di tempat baru.

Berdasarkan pada kondisi lahan serta perhitungan pendapatan yang akan diperoleh petani pada lokasi Transmigrasi SP4 Hote maka lokasi ini layak untuk penempatan transmigran dengan uraian penilaian kelayakan usaha transmigran yaitu (1) Tahap Konsolidasi (1.0 – 1.5 tahun) ; kriteria Rp. 6.000.000. – 7.000.000 ; pendapatan bersih Alternatif I : Rp. 6.268.513 dan Alternatif II : Rp. 6.170.993 dan tingkat pencapaiannya adalah tercapai ; (2) Tahap Pengembangan (1.5 – 2.0 tahun) ; kriteria Rp. 7.000.000 –



dengan ROW 20 meter dan jalan penghubung dari lahan pemukiman baru menuju desa Hote sepanjang 1.940 meter dengan ROW 10 meter. Ruas jalan penghubung ini terdiri dari 800 meter jalan standar, 650 meter. Rencana jalan ini ditambah timbunan 1 meter dan 400 meter merupakan jalan panggung yang terbuat dari konstruksi setinggi 1.5 meter dan lebar 2.5 meter. Panjang jalan desa/jalan lahan usaha I adalah 11.125 meter (11,125 Km) dengan ROW 10 meter.

Jembatan yang direncanakan dibangun di jalan poros sebanyak 2 buah, yang mana 1 buah dengan bentangan 10 meter dan 1 buah lainnya dengan bentangan 6 meter. Jembatan penghubung sebanyak 3 buah dengan panjang masing-masing 6 meter. Jumlah gorong-gorong dengan diameter 1 meter di jalan poros sebanyak 2 buah dan di jalan desa sebanyak 14 buah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Tinjauan kritis. Bogor : P4W Press Bogor.
- Amri, I., & Lestari, S. D. (2018). Analisis Kesesuaian Lahan untuk Transmigrasi di Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 15(1), 17-28.
- Dewi, L. P., Nugroho, B., & Syamsun, M. (2019). Analisis Kesesuaian Lahan Transmigrasi di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(2), 67-78.
- Dwiyanto, A. (2003). Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Darmawan, D., Asyraf, M., & Aziz, N. (2022). Analysis of the Effectiveness of Transmigration Programs on Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 13(5), 12-19.
- Fauziah, F., Mubarak, M. S., & Suhartanto, D. (2021). The Impact of Transmigration Program on the Livelihood of Transmigrants in Bengkulu Province, Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 9(1), 63-71.
- Fitriani, E., & Suryana, A. (2022). Pengaruh Program Transmigrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal di Kabupaten Malang. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 42-52.
- Heeren, H. J. (1979). Transmigrasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hartono, D., & Purwanto, R. (2016). Kesesuaian Lahan untuk Transmigrasi di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 10(2), 59-72.
- Kustiyo, K., & Wibowo, A. (2017). Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Transmigrasi di Daerah Aliran Sungai Wain, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 6 (1), 1-14.
- Lasaiba, M. A., & Saud, A. W. (2022). Pemanfaatan Citra Landsat 8 Oli/Tirs Untuk Identifikasi Kerapatan Vegetasi Menggunakan Metode Normalized Difference Vegetation Index (Ndvi) Di Kota Ambon. *JURNAL GEOGRAFI. Geografi Dan Pengajarannya*, 20(1), 53-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jggp.v20n1.p53-65>
- Lasaiba, M. A. (2023a). Spatial-Temporal Variation of Land Use Changes in Ambon City. *Rekayasa*, 16(1), 84-95. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/rekayasa.v16i1.18799>
- Lasaiba, M. A. (2023b). Evaluation of Settlement Land Suitability Based on Remote Sensing and Geographical Information Systems in The City of Ambon. *SPATIAL: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 23(1), 70-84. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spatial/article/view/33157>
- Muhtadi, A., & Prabowo, D. A. (2018). Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 12(2), 107-118.

- Nugroho, B., & Setyawan, E. (2015). Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Transmigrasi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(2), 73-84.
- Pribadi, U. T., & Waluyo, E. B. (2016). Kesesuaian Lahan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 6(2), 113-121.
- Prawitasari, A., Mulyanto, B., & Nurlaili, N. (2017). Analisis Kesesuaian Lahan untuk Program Transmigrasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 28(2), 136-149.
- Rahayu, E., & Haryani, S. (2022). Determinant Factors of Successful Transmigration in West Kalimantan Province, Indonesia. *Journal of Sustainability and Development Planning*, 2(1), 1-12.
- Sunaryadi A. 2005. Pemukiman Transmigrasi Cikal Bakal Agropolitan. Jakarta Depnakertrans. Info Ketransmigrasian. Vol I No.3 Juni 2005; Hal 4.
- Suparno, E. 2006 Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Transmigrasi. [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id).
- Suhardjono, H., & Sukristijono. (2015). Analisis Kesesuaian Lahan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(3), 305-316.
- Susanto, S., Purnama, P., & Rochman, I. (2019). Analisis Kesesuaian Lahan Transmigrasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 16(2), 103-117.
- Syah, N. (2022). Evaluasi Implementasi Program Transmigrasi di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Tata Loka dan Lingkungan*, 4(1), 42-53
- Tjondronegoro, S. M., Sumaryanto, & Indrawati, I. (2021). Analysis of Transmigration Program in Indonesia: Evaluation and Challenges. *Journal of Rural Indonesia*, 2(1), 13-28
- Undang Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Witoelar, E. (2000). Pengelolaan pantai dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan pengembangan wilayah. Prosiding seminar nasional pengelolaan ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil dalam konteks negara kepulauan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Widodo, T. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Solo : UNS Press.
- Wulandari, R. A., Nastiti, A. K., & Pambudi, P. (2021). Analysis of the Implementation of Transmigration Program in Sidoarjo Regency. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(1), 11-22.